

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RETRIBUSI JASA UMUM PELAYANAN PERSAMPAHAN DI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA TANJUNGPINANG

Oleh:

ARYANA

NIM.180563201123

ABSTRAKS

Keberadaan sampah ialah sebuah fenomena sosial yang sulit buat di hindari pada kehidupan bermasyarakat, salah satu cara untuk menangani masalah sosial ini pemerintah Kota Tanjungpinang menerbitkan peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum Pelayanan Persampahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan Retribusi pelayanan persampahan dalam meningkatkan pendapatan asli Daerah serta mengurangi jumlah sampah yang berserakan di Kota Tanjungpinang. Teori yang digunakan yaitu terkait Kebijakan Publik. Metode penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Dimana informan pada penelitian ini terdiri dari Kepala Seksi Penanganan Sampah, Petugas UPT TPA, Petugas Badan Pengelola Pajak Retribusi Daerah serta Masyarakat. Penelitian ini menggunakan Teori implementasi dari Van Meter dan Van Horn dalam Subarsono,2016 dengan indikator : standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, hubungan antar organisasi, kondisi sosial, politik dan ekonomi, dan disposisi implementor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan retribusi pelayanan persampahan belum berjalan secara optimal, Dikarenakan belum meratanya sosialisasi peraturan Daerah hingga masyarakat masih ada yang tidak mengetahui adanya peraturan tersebut, kemudian adanya penurunan hasil dari pendapatan retribusi persampahan secara berturut-turut mulai dari tahun 2018 hingga tahun 2021 mengalami penurunan hingga tidak mencapai target yang ditetapkan dikarenakan masih banyak masyarakat yang belum membayar bahkan tidak mau membayar retribusi tersebut.

Kata kunci : Implementasi, kebijakan pemerintah, peraturan Daerah, Retribusi

***POLICY IMPLEMENTATION OF PUBLIC SERVICES
RETRIBUTION FOR SOLID WASTE SERVICES IN
TANJUNGPINANG CITY ENVIRONMENTAL DEPARTMENT***

By:

ARYANA

NIM.180563201123

ABSTRACT

The existence of waste is a social phenomenon that is difficult to avoid in social life, one way to deal with this social problem is that the Tanjungpinang City government issued a Tanjungpinang City Regional Regulation Number 5 of 2012 concerning Public Service Charges for Garbage Services. This study aims to determine the implementation of the Garbage Service Retribution policy in increasing the region's original income and reducing the amount of scattered waste in the city of Tanjungpinang. The theory used is related to Public Policy. This research method is a descriptive research with a qualitative approach. Data collection techniques are interviews, observation and documentation. Where the informants in this study consisted of the Head of the Waste Handling Section, UPT TPA officers, Regional Tax Retribution Management Agency officers and the community. This study uses implementation theory from Van Meter and Van Horn in Subarsono, 2016 with indicators: policy standards and targets, resources, inter-organizational relations, social, political and economic conditions, and implementor dispositions. The results of the study show that the implementation of the garbage service levy policy has not run optimally, due to the uneven socialization of regional regulations so that there are still people who do not know about these regulations, then there is a decrease in the results of solid waste retribution revenues in a row starting from 2018 to 2021 has decreased until it does not reach the set target because there are still many people who have not paid or do not even want to pay the levy.

Keywords: Implementation, government policy, Regional regulations, Retribution